

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022)

Rachma Hida Silfa Utami¹⁾, Kartika Berliani²⁾.

^{1,2)} Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia Membangun
^{1,2)} rachma.h@student.inaba.ac.id, kartika.berliani@inaba.ac.id.

ABSTRACT

This study investigates how the Bandung City Regional Financial and Asset Management Agency's internal control system, Good governance practices, and government accounting standards (SAP) will affect the quality of its financial statements in 2022. The goal of the study is to comprehend a number of variables that may impact the accuracy, dependability, and legitimacy of financial statements issued by public entities in the context of local government. The quantitative method used combines secondary data from relevant documents and literature with primary data from employee interviews who are directly involved in financial report preparation. This is done through a descriptive and verification approach. The Bandung City Regional Financial and Asset Management Agency's 82 employees and State Civil Apparatus served as the research subjects for this study, which was carried out using a probability sampling technique. The results show that there is a reporting delay even though the Bandung City Regional Financial and Asset Management Agency's financial reports are of high quality. The quality of financial statements is significantly impacted by SAP and SPIP, but not significantly by Good governance. For a more comprehensive improvement, it is therefore advised to periodically develop SAP and SPIP implementation while continuing to pay attention to Good governance issues.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi dampak Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *Good governance*, dan Sistem Pengendalian Intern pada kualitas laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tahun 2022. Pada konteks pemerintahan daerah, Penelitian memiliki tujuan untuk memahami serangkaian faktor yang dapat mempengaruhi integritas, keandalan, dan kredibilitas laporan keuangan entitas publik. Metode yang diaplikasikan yaitu kuantitatif melalui pendekatan secara deskriptif dan verifikasi, menggunakan data primer dari wawancara dan pengambilan kuesioner dengan karyawan yang langsung terlibat saat pembuatan laporan keuangan, serta data sekunder dari dokumen, internet dan literatur terkait. Penelitian dilakukan dengan teknik probability sampling pada 82 responden, yaitu pegawai dan Aparatur Sipil Negara ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Hasil temuan menyajikan bahwa meskipun kualitas laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung dalam kondisi baik, tetapi terdapat keterlambatan dalam pelaporan. SAP dan SPIP memang pengaruh yang signifikan pada kualitas laporan keuangan, sementara *Good governance* tidak memegang pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, maka disarankan untuk melakukan pengembangan berkala pada implementasi SAP dan SPIP, secara bersamaan tetap memperhatikan aspek *Good governance* untuk peningkatan yang lebih holistik.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintah; Good Governanc; Sistem Pengendalian Intern; Kualitas Laporan Keuangan

1. PENDAHULUAN

Akuntansi Pemerintahan berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi badan pemerintah, dengan tujuan bukan mencari laba seperti organisasi profit atau non-profit. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tujuan, sumber dana, dan regulasi pengendalian barang dan jasa (Ikriyati & Aprila, 2019). Akuntansi pemerintahan menghasilkan laporan keuangan yang dapat memperlihatkan aspek pengelolaan dan administrasi keuangan negara, serta membantu memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran dan undang-undang yang berlaku (Jusmani et al., 2022). Dalam era globalisasi ini, meningkatnya tingkat intelektual masyarakat mendorong

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan instansi pemerintahan yang efektif dengan bertanggung jawab atas pencapaian tujuan instansi tersebut, (Yanti et al., 2020).

Laporan keuangan adalah alat penting untuk memahami posisi keuangan dan pencapaian suatu instansi. Mereka membantu memprediksi perubahan, mengukur kesehatan keuangan, memantau kinerja, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, (Nuvitasari et al., 2019).

Fenomena tentang laporan keuangan saat ini semakin menjadi topik yang ramai dibicarakan. Banyak permasalahan terkait kurangnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia yang terus menarik perhatian utama.

Masalah ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, dan kekurangan kemampuan dari staf akuntansi. Hal ini berpotensi memberikan dampak negatif pada kualitas LKPD, (Alminanda & Marfuah, 2018; Annisa et al., 2021).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan 15.674 permasalahan, dengan 7.020 terkait dengan melahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI), 8.166 terkait ketidakpatuhan pada peraturan, dan 538 terkait ketidakefisienan pengelolaan anggaran. Kerugian akibat ketidakpatuhan mencapai Rp. 17,33 triliun, dan kerugian karena ketidakefisienan sebesar Rp. 1,04 triliun. Dari ketidakpatuhan, terdapat penyimpangan administrasi sebanyak 2.651 kasus dan kekurangan penerimaan sebanyak 5.465 kasus, (BPK RI, 2022; Sari et al., 2023).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset Kota Bandung atas urusan Pemerintah Daerah. Meskipun begitu, Kota Bandung masih menghadapi masalah dalam kualitas laporan keuangan. Setiap tahun, Kota Bandung harus menyampaikan LKPD, yang kemudian diperiksa oleh BPK untuk memberikan penilaian opini, (A. Sujaya et al., 2020; BPK RI, 2023). Berikut adalah daftar opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung dari tahun 2018 hingga 2022:

Tabel 1. Rekap Opini LKPD di Kota Bandung Tahun 2018-2022

No	Tahun	Opini
1	2018	WTP
2	2019	WTP
3	2020	WTP
4	2021	WTP
5	2022	WDP

Sumber: BPK, 2023

Kota Bandung telah meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK di tahun 2022. Opini WDP menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas tersebut secara umum mencerminkan kondisi keuangan, perolehan usaha, dan aliran kas wajar yang berpautan bersama prinsip akuntansi umum di Indonesia, kecuali untuk beberapa hal yang dikecualikan. Berikut adalah temuan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Kota Bandung untuk Tahun Anggaran 2022:

Tabel 2. Temuan BPK atas LKPD Kota Bandung

No	Temuan
1.	Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap tidak layak karena terdapat perbedaan antara data obyek tanah yang disewakan dan data aset tetap tanah di KIB, selain itu terdapat penjualan aset tetap dan atau aset lainnya berupa kendaraan dan bongkaran bangunan yang belum diketahui penghapusan dalam Neraca dan Barang Milik Daerah dalam keadaan rusak parah masih tercatat sebagai aset tetap.
2.	Belanja modal peralatan dan mesin mencapai Rp. 365.925.785.256,00, sedangkan aset tetap peralatan dan mesin mencapai Rp. 3.606.557.009.832,72. Namun, terdapat belanja modal untuk CCTV di Dinas Perhubungan sebesar Rp. 2.444.607.976,00 tanpa analisis kebutuhan, HPS tidak berdasarkan survei harga pasar, dan pemecahan kontrak yang mencurigakan. Ada juga pemberian fee Rp. 70.000.000,00 kepada enam perusahaan oleh PT. SMA. Pada 2023, PT. SMA, Wali Kota Bandung, Kepala Dinas Perhubungan, dan PPK terlibat dalam proses hukum dengan KPK.
3.	Keberlebihan pembayaran untuk tiga paket pekerjaan Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp.389.166.569,06.

Sumber: BPK, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2, Kota Bandung mendapat beberapa temuan dari BPK yang terkait dengan penyajian laporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi tidak optimal. Hal ini dapat mengakibatkan kemerosotan dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Kota Bandung pada tahun 2022.

Dalam memandu penciptaan laporan keuangan pemerintah, lembaga pemerintah menerapkan SAP yang terdapat pada PP No. 71 Tahun 2010, yang mencakup rangkaian prinsip akuntansi yang harus diimplementasikan dalam pembuatan dan pemaparan laporan keuangan pemerintah. Peningkatan kualitas LKPD akan dapat dilakukan melalui penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), (Abdurrahim et al., 2019).

Hasil temuan (Yanti et al., 2020), menyimpulkan bahwa implementasi SAP memiliki dampak positif secara signifikan pada kualitas laporan keuangan, yang telah menegaskan pentingnya penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, di mana semakin taat terhadap SAP, semakin baik kualitas laporan keuangannya. Selain itu menurut temuan (Aminy et al., 2021), pemerintah juga perlu menerapkan *Good governance* secara baik untuk membentuk laporan

keuangan yang berkualitas. *Good governance* merupakan faktor penting dalam kinerja perusahaan, dimana pengelolaan yang buruk menimbulkan merugikan pemegang saham dan bahkan mengakibatkan kegagalan bisnis

Hasil penelitian (Gea & Putra, 2022), menyimpulkan bahwa *Good governance* memegang dampak secara signifikan pada kualitas laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bila makin berkualitasnya laporan keuangan, maka akan menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan yang semakin baik dan dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Hal tersebut membuat pemerintah membutuhkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam menciptakan informasi keuangan yang berkualitas tinggi, maka SPIP merupakan faktor lain yang memegang pengaruh pada kualitas laporan keuangan. Temuan dari (AgustiningTyas et al., 2020), memaparkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) penting karena dapat memastikan perlindungan terhadap aset organisasi, serta membuktikan keakuratan dan keandalan data akuntansi, yang menaikkan efisiensi dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi.

Hasil temuan oleh (Aditya & Surjono, 2017) menyimpulkan bahwa SPI memiliki pengaruh positif kepada kualitas laporan keuangan. Temuan ini menjabarkan bahwa semakin baiknya sebuah SPIP akan selaras dengan semakin baiknya tingkat kualitas laporan keuangan yang diciptakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 terkait SAP dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, dalam Paragraf 24 dijelaskan mengenai LKPD. Paragraf tersebut memaparkan bahwa tujuan laporan keuangan merupakan untuk menyajikan data yang sesuai mengenai kondisi keuangan entitas pelapor dan seluruh transaksinya pada suatu periode pelaporan.

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut (Mahmudi, 2019), Kualitas laporan keuangan menunjukkan tingkat keandalan dan kegunaan informasi yang disajikan. Informasi yang andal berarti akurat, bebas bias, dan dapat diverifikasi. Informasi yang berguna berarti relevan, mudah dipahami, dan membantu pengguna dalam pengambilan keputusan.

Dalam PP pada Nomor 71 Tahun 2010, Laporan terstruktur terkait susunan keuangan dan rangkaian transaksi yang dilaksanakan oleh sebuah entitas pelaporan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut Mardiasmo (2018), Standar Akuntansi adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana transaksi keuangan dicatat, diklasifikasikan, diringkas, dan disajikan dalam laporan keuangan.

Aturan ini dibuat untuk memvalidasi bahwa laporan keuangan yang dihasilkan itu andal, relevan, dan konsisten.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 3, SAP merupakan rangkaian prinsip akuntansi yang diimplementasikan saat pembuatan dan pemaparan laporan keuangan pemerintah

Tata Kelola Pemerintah (*Good governance*)

Menurut Mardiasmo (2018), memaparkan *Good governance* merupakan pengada manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggungjawab, serta Manajemen ini harus memastikan pasar yang adil dan demokrasi, mencegah korupsi, memastikan disiplin anggaran, dan menciptakan kerangka hukum dan politik yang memungkinkan bisnis berkembang.

Berdasarkan PP pada No. 101 Tahun 2000, Kepemerintahan yang mempertahankan rangkaian prinsip terkait transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, profesionalitas, pelayanan prima, efisiensi, dan efektifitas, sert demokrasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP adalah kumpulan prosedur dan kebijakan yang integral di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang membantu pemerintah menggapai target organisasi seperti efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan hukum, serta melindungi aset dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Mahmudi, 2019).

Dalam PP No.60 Tahun 2008, proses yang mencakup rangkaian aktivitas berkelanjutan yang dilaksanakan pimpinan serta semua karyawan untuk membangunkan kepercayaan atas tercapainya tujuan organisasi dengan operasi yang efektif dan efisien, kepercayaan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan pada peraturan uud.

3. METODOLOGI

Penelitian ini mengeksplorasi dampak Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *Good governance*, dan Sistem Pengendalian Intern pada kualitas laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tahun 2022. Pada konteks pemerintahan daerah, Penelitian memiliki tujuan untuk memahami serangkaian faktor yang dapat mempengaruhi integritas, keandalan, dan kredibilitas laporan keuangan entitas publik, (Rohmah et al., 2020).

Metode yang diaplikasikan yaitu kuantitatif melalui pendekatan secara deskriptif dan verifikatif, menggunakan data primer dari wawancara dengan karyawan yang langsung terlibat saat pembuatan laporan keuangan, serta data sekunder dari dokumen dan literatur terkait, (Huliselan, 2022). Penelitian dilakukan dengan teknik probability sampling pada 82 responden, yaitu pegawai dan Aparatur Sipil Negara ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, (Huliselan, 2022).

Tabel 3. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	No. Kues	Skala
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Relevansi	1-3	Ordinal
	2. Keandalan	4-5	
	3. Dapat dibandingkan	6-7	
	4. Dapat dipahami	8-9	
SAP (X1)	1. Basis Akuntansi	10-14	
	2. Prinsip Nilai Historis	15-16	
	3. Prinsip Realisasi		
	4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal	18	
	5. Prinsip Perioditas	19	
	6. Prinsip Konsistensi	20	
	7. Prinsip Pengungkapan Penuh	21	
	8. Prinsip Penyajian Wajar	22	
Good governance (X2)	1. Profesionalitas	23	Ordinal
	2. Akuntabilitas	24-26	
	3. Transparansi	27	
	4. Pelayanan Prima	28-29	
	5. Demokrasi	30-31	
	6. Efisiensi, Efektivitas	32-33	
	7. Supremasi hukum dan Dapat diterima oleh seluruh masyarakat	34-35	
SPIP (X3)	1. Lingkungan Pengendalian	36-37	
	2. Penilaian Resiko	38-39	
	3. Kegiatan Pengendalian	40-41	
	4. Informasi dan Komunikasi	42-43	
	5. Pemantauan Pengendalian Internal	44-45	

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Ringkasan Kuisisioner

Ket.	Total
Kuisisioner dibagikan	82
Kuisisioner kembali	82
Persentase kuisisioner	100%

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan temuan, memaparkan dari 82 angket yang telah disebar pada pegawai dan Aparatur Sipil Negara yang terlibat langsung dalam pembuatan laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, maka semua angket telah berhasil dijawab dan dikembalikan dengan baik, sehingga diperoleh persentase kuisisioner yaitu 100%.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Kisaran Kolerasi	r tabel	Ket
1.	Kualitas Laporan Keuangan	0,249*- 0,692*	0,217	Valid
2.	SAP	0,538* 0,724*	0,217	Valid
3.	Good governance	0,315* 0,642*	0,217	Valid
4.	SPIP	0,395* 0,817*	0,217	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Hasil temuan memaparkan bahwa nilai kolerasi dari setiap variable berada diatas r tabel yaitu 0,217, sehingga dapat dinyatakan bahwa setiap kuesioner dapat dipercaya dan dinyatakan Valid.

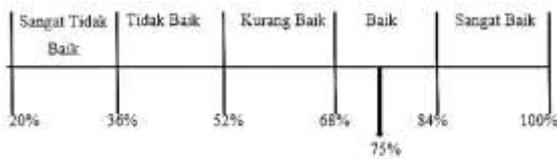
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Alpha Cronbach	Nilai Kritis	Ket
1.	Kualitas Laporan Keuangan	0,674	0,60	Reliabel
2.	SAP	0,869	0,60	Reliabel
3.	Good governance	0,770	0,60	Reliabel
4.	SPIP	0,902	0,60	Reliabel

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Hasil temuan memaparkan bahwa tiap variable memiliki Alpha Cronbach > 0,60, yang artinya tiap variable yang digunakan dapat diandalkan atau dinyatakan reliabel.

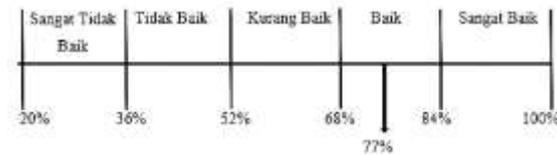
Hasil Analisis Statistik Deskriptif



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Gambar 1. Kualitas Laporan Keuangan

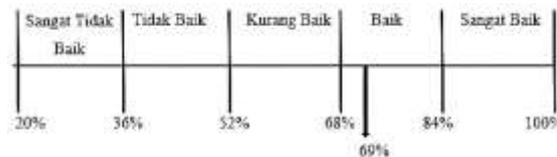
Hasil temuan Kontinum, memaparkan nilai aktual yang didapatkan dari keseluruhan pernyataan tentang Kualitas Laporan Keuangan yaitu 2.790, sedangkan total skor idealnya adalah 3.690. Dengan demikian, skor total yang diperoleh adalah $(2.790/3.690) \times 100\% = 0,75$ atau 75%. Berdasarkan nilai ini, dapat disimpulkan bahwa nilai total skor aktual tanggapan responden dari 9 pernyataan variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah 75%, yang dapat dikategorikan kedalam Baik. Meskipun, masih terdapat kekurangan sebesar 25%, terutama didalam hal indikator relevan.



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Gambar 2. Standar Akuntansi Pemerintah

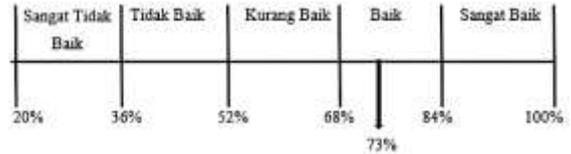
Hasil temuan Kontinum, memaparkan Skor aktual dari seluruh pernyataan tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah 4.176, sedangkan total skor idealnya adalah 5.330. Sehingga diperoleh skor total yang diperoleh yaitu 77%, dan dapat dikategorikan kedalam Baik. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan sebesar 23%, terutama didalam indikator basis akuntansi.



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Gambar 3. Good governance

Hasil temuan Kontinum, memaparkan skor aktual dari seluruh pernyataan tentang Good governance adalah 3.684, sedangkan total skor idealnya adalah 5.330. Sehingga skor total yang diperoleh adalah 69%, yang dapat dikategorikan kedalam Baik. Meskipun, masih terdapat kekurangan sebesar 31%, terutama didalam hal indikator Profesionalitas.



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Gambar 4. SPIP

Hasil temuan Kontinum, memaparkan skor aktual dari seluruh pernyataan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah 3.145, sedangkan total skor idealnya adalah 4.300. Sehingga diperoleh skor total yang diperoleh adalah 73%, yang dapat dikategorikan kedalam Baik. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan sebesar 27%, terutama didalam hal indikator penilaian risiko.

Tabel 7. Temuan Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Test Statistic	.080
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

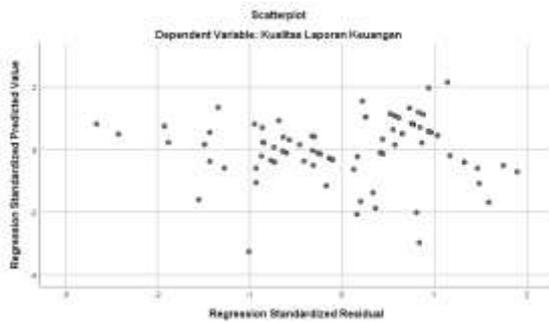
Berdasarkan hasil temuan, nilai probabilitas yang diperoleh yaitu 0,200. hasil ini lebih besar dari nilai $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal pada taraf signifikansi (α) = 5%.

Tabel 8. Temuan Multikolinearitas

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
1.000	1.000
.987	1.013
.988	1.012

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan temuan atas, nilai tolerance untuk variabel SAP (X1) adalah 1,000, untuk Good governance (X2) adalah 0,987, dan untuk SPIP (X3) adalah 0,988. Semua hasil yang diperoleh bernilai lebih besar dari 0,10. Disisi lain, nilai VIF untuk SAP (X1) adalah 1,000, untuk Good governance (X2) adalah 1,013, dan untuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) adalah 1,012. Semua hasil perhitungan VIF lebih kecil dibaindakng 10,00. Sehingga kesimpulan yang diperoleh, yaitu tidak terjadi multikolinearitas di antara serangkaian variabel tersebut



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Gambar 5. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan output Scatterplot, serangkaian titik tersebar dengan acak tanpa menimbulkan pola. Titik-titik juga terpecah diantara bagian atas dan bawah pada nol di sumbu Y. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh, yaitu tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Ini menggambarkan bahwa model regresi memenuhi syarat dan ideal.

Hasil Analisis Statistik verifikatif

Tabel 9. Temuan Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a	
Unst Coeff	
B	Std. Error
12.054	4.177
.158	.057
.026	.052
.333	.056

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Hasil temuan berhasil menyajikan regresi linear berganda seperti berikut:
 $Y = 12,054 + 0,158X_1 + 0,026X_2 + 0,333X_3 + e$

Tabel 10. Temuan Uji Korelasi Pearson

Correlations	DPR
Kualitas Laporan Keuangan	1
SAP	.247
Good governance	.109
SPIP	.547

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

1. Hubungan antara SAP (X1) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) tergolong rendah, karena koefisien korelasi menunjukkan 0,247.
2. Hubungan antara Good governance (X2) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) sangat rendah, karena koefisien korelasi sebesar 0,109.
3. Hubungan antara SPIP (X3) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) tergolong sedang, dengan koefisien korelasi menunjukkan 0,547.

Tabel 11. Temuan Koef Determinasi

Mod Sum ^b				
Model	R	R Square	Adj R Square	Std. Error of the Estimate
1	.603 ^a	.363	.339	2.922

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Temuan memaparkan, hasil R Square adalah 0,363, menunjukkan bila SAP, Good governance, dan SPIP secara serentak memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan yaitu 37%. Sedangkan sisa sekitar 63%, terpengaruh oleh beragam faktor diluar penelitian ini.

Tabel 11. Hasil Uji T

Coefficient ^a		
Model	t	Sig.
(Constant)	2.886	.005
SAP	2.757	.007
Good governance	.487	.628
SPIP	5.976	.000

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

1. Hasil temuan memaparkan, H1 diterima, dimana SAP memegang dampak yang parsial pada Kualitas Laporan Keuangan. Hasil memaparkan dengan t hitung (2,757) > t tabel (1,990), serta taraf signifikansi (0,007) < (0,05). H1 diterima,
2. Hasil temuan memaparkan, H2 ditolak, H0 diterima, artinya Good governance tidak memegang pengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan. Temuan memaparkan hasil t hitung (0,487) < t tabel (1,990), serta taraf signifikansi (0,628) > (0,05).
3. Hasil temuan memaparkan, H3 diterima, SPIP memegang pengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini divalidasi oleh t hitung (2,757) yang lebih besar dari nilai t tabel (5,976) dan taraf signifikansi (0,000) < (0,05).

Tabel 11. Temuan Uji F

ANOVA ^a	
F	Sig.
14.835	.000 ^b

Berdasarkan tabel yang disajikan, nilai F hitung yang diperoleh adalah 14.835. Hasil kemudian dibandingkan bersama F tabel pada distribusi F dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, dengan $df_1 = k-1 = 4-1 = 3$, dan $df_2 = n-k = 82-4 = 78$. Dari perbandingan tersebut, diperoleh hasil F hitung (14,835) jauh lebih besar daripada nilai F tabel (2,722). Berdasarkan kriteria uji hipotesis, H4 dapat diterima. Temuan ini memaparkan bahwa secara serentak SAP, Good governance, dan SPIP memegang pengaruh secara signifikan pada Kualitas

Laporan Keuangan, dibuktikan dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$.

Temuan Standar Akuntansi Pemerintah pada Kualitas Laporan Keuangan

SAP (X1) memegang dampak parsial pada Kualitas Laporan Keuangan (Y) di BKAD Kota Bandung, hasil t hitung 2,757 yang melebihi t tabel 1,990, serta taraf signifikansi $0,007 < 0,05$. Hasil temuan konsisten dengan penelitian (Ikriyati & Aprila, 2019), yang menunjukkan bila SAP mempunyai pengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan. Hubungan menunjukkan jika penerapan SAP yang baik dapat menambah kualitas laporan keuangan dan mengurangi permasalahan dalam pengakuan dan pemaparan, sehingga dapat mencapai opini wajar tanpa pengecualian.

Temuan Good governance pada Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan temuan, dapat disimpulkan bila *Good governance* (X2) tidak mendapati adanya pengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan (Y). Sehingga, H2 yang memaparkan adanya dampak *Good governance* pada Kualitas Laporan Keuangan ditolak. Keputusan ini diambil secara parsial berdasarkan thitung untuk *Good governance* yaitu 0,487, yang lebih kecil dari t tabel (1,990), serta taraf signifikansi $0,628 > 0,05$. Artinya, *Good governance* tidak memegang pengaruh secara parsial pada Kualitas Laporan Keuangan di BKAD Kota Bandung.

Hasil ini selaras dengan temuan (Aminy et al., 2021), memaparkan bila *Good governance* tidak memegang dampak pada Kualitas Laporan Keuangan. Salah satu alasan yang mungkin adalah adanya kekurangan dalam variabel tersebut, seperti karyawan yang tidak mempunyai kualifikasi formal yang sesuai, yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Temuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan temuan statistik, disimpulkan bila SPIP (X3) memegang pengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan (Y) di BKAD Kota Bandung. Hipotesis yang menyatakan pengaruh ini diterima secara parsial, dengan thitung (5,976) melebihi t tabel (1,990), serta taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil temuan sejalan dengan penelitian oleh (Ayu Reswari & Nazir, 2022), yang menunjukkan semakin bagusnya SPIP akan berbandung lurus dengan semakin baiknya kualitas laporan keuangan yang diperoleh. Dengan penerapan SPIP yang baik, kesalahan saat pembuatan dan pemaparan laporan keuangan pemerintah dapat diminimalkan, sehingga unsur laporan keuangan yang berkualitas dapat terpenuhi.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil temuan dari analisis dan pengujian data bertahap ini telah memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, Kualitas Laporan Keuangan mencapai tingkat kepuasan sebesar 75%, meskipun terdapat kekurangan terutama terkait keterlambatan pelaporan yang dapat mengurangi relevansi dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan.
2. Standar Akuntansi Pemerintah dinilai baik dengan tingkat kepuasan 77%, meskipun masih terdapat kekurangan dalam pencatatan nilai historis kewajiban dan penatausahaan aset.
3. *Good governance* juga dinilai baik dengan tingkat kepuasan 69%, walaupun masih ada pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi dan adanya risiko terkait praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. SPIP juga tergolong baik dengan tingkat kepuasan 73%, namun terdapat kekurangan terutama dalam perencanaan yang tidak sesuai ketentuan dan kurangnya evaluasi risiko yang menyeluruh.
5. SAP terbukti memegang dampak yang signifikan pada Kualitas Laporan Keuangan (H1 diterima), sementara *Good governance* tidak berpengaruh (H1 ditolak). SPIP juga terbukti memegang pengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan (H1 diterima).
6. Secara simultan, SAP, *Good governance*, dan SPIP memegang pengaruh secara signifikan pada Kualitas Laporan Keuangan dengan nilai uji F sebesar 14,853 (fhitung $>$ ftabel), menunjukkan penolakan terhadap H_0 dan penerimaan H_4 .

5.2. Saran

Dalam mengembangkan Kualitas Laporan Keuangan, SAP, *Good governance*, dan SPIP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung meliputi: membuat jadwal yang jelas dan realistis untuk setiap tahap penyusunan laporan keuangan, memastikan pemahaman yang baik terhadap Standar Akuntansi Pemerintah melalui evaluasi kinerja karyawan dan edukasi, melakukan proses rekrutmen yang lebih ketat untuk memastikan kualifikasi pegawai sesuai, serta melakukan pengelolaan perencanaan yang matang dan memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Saran untuk peneliti selanjutnya mencakup: memverifikasi semua variable lain yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dan memperluas populasi serta jumlah sampel untuk membandingkan temuan penelitian dengan temuan penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sujaya, F., Yanti, Y., & Wibowo, R. (2020). Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung. *ProBank*, 5(2), 157–166. <https://doi.org/10.36587/probank.v5i2.722>
- Abdurrahim, A., Hidayati, D. N., & Budiarto, B. (2019). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat)*. 4–4. https://doi.org/10.1007/978-94-024-1267-3_100369
- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32897/jsikap.v2i1.64>
- AgustiningTyas, V. E., Tyasari, I., & Yogivaria, D. W. (2020). Pengaruh *Good governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Pada OPD Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4458>
- Alminanda, P., & Marfuah, M. (2018). Peran Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(2), 117–132. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i2.2620>
- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan *Good governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147. <https://doi.org/10.53512/valid.v18i2.181>
- Annisa, S., Rizal, M., & Herawaty, T. (2021). Studi Literatur: Implementasi Good Corporate Governance Pada Bisnis Keluarga. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 72–83. <https://doi.org/10.38043/jimb.v6i2.3206>
- Ayu Reswari, Y., & Nazir, N. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Good Public Governance Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kementerian Ketenagakerjaan. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(9), 1051–1059. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i9.487>
- BPK RI. (2022). *BPK UNGKAP 9.158 TEMUAN SENILAI RP18,37 TRILIUN PADA SEMESTER I TAHUN 2022*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-ungkap-9158-temuan-senilai-rp1837-triliun-pada-semester-i-tahun-2022>
- BPK RI. (2023). *Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/>
- Gea, O. O., & Putra, R. R. (2022). Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(3), 1517–1525. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.992>
- Huliselan, M. (2022). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengalaman Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Maluku). *11(2)*, 529–539. <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v11i2.1213>
- Ikriyati, T., & Aprilia, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Jusmani, J., Hendri, E., & Kurniawan, T. B. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 199–212. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7862>
- Mahmudi, M. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2019.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Nuvitasari, A., Citra Y, N., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 341. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21144>
- Rohmah, L., Noor Shodiq Askandar, & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra, OPengaruh*(05), 43–51.
- Sari, K. W., Sokarina, A., & Jumaidi, L. T. (2023). Determinan Kualitas Hasil Audit Inspektorat Kota Mataram. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan*

- Humaniora*, 9(3), 343–348.
<https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.402>
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–8.
<https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>